Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOPAP:**	ITJ-OT.02.02-67
	Tanggal Pembuatan:	13 Juni 2025
	Tanggal Revisi:	13 Juni 2025
	Tanggal Efektif:	13 Juni 2025
	Disahkan Oleh:	Inspektur Jenderal Ditandatangani secara elektronik oleh : Dr. Reynhard Silitonga
	Nama SOPAP:	Perencanaan Reformasi Birokrasi

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. 5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrast Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.	1. Memiliki Pengetahuan tentang Grand Desain RB 2. Memiliki Pengetahuan tentang Pedoman Pelaksanaan RB 3. Memiliki Pengetahuan tentang tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 4. Memiliki Pengetahuan tentang Rencana Kerja RB 5. Memiliki Pengetahuan tentang Penyusunan Rencana Kerja RB 6. Memiliki kemampuan menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak 7. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 8. Memiliki kemampuan pengolahan data
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Penyusunan Tim Kerja 2. SOP Laporan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Perundang-undangan 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Jaringan Internet
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
Apabila tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak efektif	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian PPP	Ketua Tim KRB	Tim KRB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan Kepala Bagian PPP untuk menyusun konsep perencanaan kerja dan Road Map terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal	Mulai				Rencana Kerja dan Roadmap RB, Hasil Evaluasi RB Tahun sebelumnya	30 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Ketua Tim KRB untuk bmenyusun konsep perencanaan kerja dan Road Map terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal						30 menit	Disposisi	
3	Memerintahkan Tim KRB untuk bmenyusun konsep perencanaan kerja dan Road Map terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal						3 hari	Disposisi, Dokumen Hasil Koordinasi	
4	Menghimpun dan menyusun konsep perencanaan kerja dan Road Map terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal			Y			3 hari	Konsep Rencana Kerja dan Road Map RB Itjen	
5	Memeriksa konsep perencaanan kerja dan konsep Road Map, bila setuju maka diserahkan ke Kepal Bagian PPP untuk mendapat persetujuan, jika ada perbaikan dikembalikan ke Tim KRB		Y		T		2 jam	Konsep Rencana Kerja dan Road Map RB Itjen	
6	Memeriksa konsep perencaanan kerja dan konsep Road Map, bila setuju maka diserahkan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk mendapat persetujuan, jika ada perbaikan dikembalikan ke Ketua Tim KRB	Y		T			2 jam	Konsep Rencana Kerja dan Road Map RB Itjen	
7	Melakukan koreksi dan menyetujui serta memerintahkan Kepala Bagian PPP menyampaikan/mensosialisasikan kepada Tim KRB, Para Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian/Kapokja serta pihak terkait dan jika tidak setuju mengembalikan perbaikan kepada Kepala Bagian PPP		T				2 jam	Disposisi, Dokumen Rencana Kerja	
8	Memerintahkan Ketua Tim KRB untuk memonitor pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi dan mendokumentasikan sebagai data dukung RB	Y					30 menit	Disposisi, Dokumen Rencana Kerja	
9	Memerintahkan Tim KRB untuk memonitor pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi dan mendokumentasikan sebagai data dukung RB						1 hari	Disposisi, Dokumen Rencana Kerja, Dokumen Hasil Monitoring Rencana Kerja	
10	Menyusun dokumen monitor pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi dan mendokumentasikan sebagai data dukung RB				Selesai		1 hari	Disposisi, Dokumen Rencana Kerja, Dokumen Hasil Monitoring Rencana Kerja	